

Kemitraan Pemerintah, Masyarakat dan Swasta Berbasis Human Governance untuk Mewujudkan Kota Surakarta sebagai Kota Layak Anak

Sri Yuliani, NIDN.0030076305

Sudaryanti, NIDN.0026045704

Muchtar Hadi, NIDN. 0020035305

Urgensi Penelitian

- Kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta yang berbasis **Human Governance** sangat penting untuk mewujudkan **Kota Layak Anak**.
- Karena Kota Layak Anak adalah kota yang dikembangkan atas dasar prinsip-prinsip penghargaan pada nilai kemanusiaan atau harkat anak sebagai manusia yang utuh baik secara jasmani dan rohani.

Tujuan

- Tahun pertama :
 - mengidentifikasi pola kemitraan
 - mengidentifikasi hambatan untuk mengembangkan model kemitraan berbasis Human Governance.
- Tahun kedua :
 - Merumuskan model kemitraan berbasis Human Governance
 - Menyusun panduan kemitraan berbasis Human Governance

Metode

- Tahun 1 : **Diagnosing** (identifikasi masalah dan kendala) dan **Action plan** (merumuskan draft model kemitraan)
- Tahun 2 : **Evaluating** (mengkaji efektivitas kemitraan), **Specifying** (identifikasi temuan-temuan umum) dan pengembangan model kemitraan

Hasil

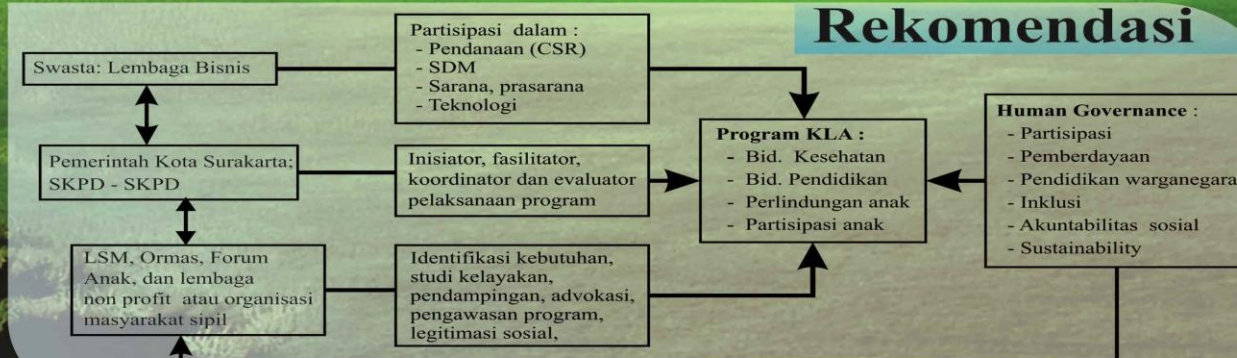
- Belum ada kesepakatan kemitraan yang melibatkan ketiga aktor Governance (Pemerintah, Masyarakat dan Swasta). Kemitraan hanya antara **Pemerintah** dengan **Swasta** dalam **Program Kartu Insentif Anak (KIA)** dan antara **Pemerintah (SKPD)** dengan **LSM**, dan **organisasi masyarakat** dalam Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS)
- Efektivitas kemitraan: 1) Program KIA belum efektif. Baru 20.000 anak dari 140.000 anak di Kota Solo yang memiliki KIA. Pemanfaatan KIA rendah dan jumlahnya tidak diketahui dengan pasti; 2) Keberadaan PTPAS belum maksimal ditinjau dari pelaksanaan tugas dan fungsi birokrasi pemerintah (SKPD dan instansi terkait)
- Hambatan : 1) Partisipasi anak rendah; 2) Komitmen dan kapasitas aktor kemitraan lemah; 3) masih kuatnya budaya formalisme birokrasi

Simpulan

- Ditinjau dari perspektif Human Governance, kemitraan dalam KLA :
- Belum mampu mendorong partisipasi dan pemberdayaan ketiga aktor *governance*, terutama masyarakat dan anak.
 - Ruang lingkup kemitraan sangat terbatas sehingga belum terjadi sharing sumber daya antar aktor kemitraan.
 - Tiap bidang program belum terintegrasi satu sama lain. Tidak ada rencana strategis program.



Rekomendasi



Model Kemitraan Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta Berbasis Human Governance

